

ABSTRAK

URGENSI PENINGKATAN STANDARDISASI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR DEMI MELINDUNGI KEHIDUPAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT DIKAITKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB NEGARA (*STATE RESPONSIBILITY*)

Shalma Angelica

1687077

Standar emisi kendaraan bermotor di Indonesia masih menerapkan Euro 2 dan Euro 3, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tertinggal dengan negara-negara lain seperti Malaysia dan Singapura yang sudah menerapkan Euro 5 dan Euro 6. Dampak yang ditimbulkan dari masih rendahnya standar emisi kendaraan bermotor di Indonesia adalah industri otomotif Indonesia yang menerapkan dua standar produksi kendaraan, hingga terganggunya kesehatan fisik dan mental masyarakat karena paparan polusi yang dihasilkan kendaraan bermotor. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tanggung jawab negara dalam melindungi kehidupan dan kesehatan makhluk hidup serta peningkatan standar emisi kendaraan bermotor ke standar Euro 5 dan Euro 6.

Penelitian hukum yuridis normatif ini dilakukan dengan tipe penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan undang-undang, komparatif, dan konseptual. Data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Selanjutnya data diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan tulisan ini diperoleh bahwa tidak adanya komitmen Indonesia untuk mengimplementasikan perjanjian internasional dalam menjaga lingkungan hidup, dibuktikan dengan masih digunakannya standar Euro 2 dan 3 pada kendaraan bermotor. Negara seharusnya bertanggung jawab untuk melakukan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan sehingga kualitas udara yang kian menurun akibat emisi kendaraan bermotor dapat berkurang. Untuk itu, urgensi peningkatan standar emisi kendaraan bermotor harus didukung semua pihak baik pemerintah sebagai pembuat regulasi, PT. Pertamina sebagai distributor utama bahan bakar, pelaku usaha di bidang industri otomotif serta masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan dengan menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan.

Kata Kunci: Standardisasi, Gas Buang Emisi, Kendaraan Bermotor, Tanggung Jawab Negara

ABSTRACT

URGENCY INCREASED STANDARDIZATION OF MOTOR VEHICLE EMISSIONS TO PROTECT THE LIFE AND HEALTH OF THE COMMUNITY ATTRIBUTED TO THE RESPONSIBILITY OF THE STATE

Shalma Angelica

1687077

The emission standards of motor vehicles in Indonesia still apply Euro 2 and Euro 3, it is shown that Indonesia is lagged with other countries such as Malaysia and Singapore which have implemented Euro 5 and Euro 6. The impact of the low emission standards of motor vehicles in Indonesia is Indonesia's automotive industry that implements two vehicle production standards, up to the disruption of society's physical and mental health due to pollution exposure Produced by motor vehicles. Therefore, this research is done with the aim to know the responsibility of the State in protecting the life and health of living creatures as well as increasing the emission standards of motor vehicles to the standard Euro 5 and Euro 6.

This normative juridical law study was conducted with the type of analytical descriptive research through a legal, comparative, and conceptual approach. The data used is primary, secondary, and data collection is done with the literature study. Further data is processed and analyzed qualitatively.

Based on this writing, the absence of Indonesia's commitment to implement international treaties in safeguarding the environment is evidenced by the Euro 2 and 3 standard in the motor vehicle still used. Countries should be responsible for developing sustainable environmental development, resulting in reduced air quality due to the emission of motor vehicles. Therefore, the urgency of increasing the emission standards of motorised vehicles must be supported by all the government as a regulatory maker, PT. Pertamina as the main distributor of fuel, business actors in the field of automotive industry as well as the public to maintain Environmental quality using environmentally friendly fuels.

Keywords: standardization, emissions, motor vehicle, State responsibility

DAFTAR ISI

HALAMAN

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN REVISI TUGAS AKHIR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN LAPORAN PENELITIAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
1. Secara Teoritis.....	10
2. Secara Praktis	10
E. Kerangka Pemikiran	11
1. Kerangka Teoritis	11
2. Kerangka Konseptual.....	16
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Sifat Penelitian	18
3. Pendekatan Penelitian	18
4. Jenis Data	19

5. Teknik Pengumpulan	20
6. Teknik Analisis Data	20
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II ASPEK HUKUM TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP LINGKUNGAN	23
A. Lingkungan Hidup dan Hukum Lingkungan	23
B. Tinjauan atas Pencemaran Lingkungan	26
1. Pengertian Pencemaran Lingkungan	26
2. Penegakan Hukum atas Pencemaran Lingkungan	31
C. Tanggungjawab Negara terhadap lingkungan	32
1. Perspektif Hukum Internasional	32
2. Perspektif Hukum Nasional	39
BAB III ASPEK HUKUM PENGATURAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM KAITANNYA DENGAN KESEHATAN MASYARAKAT	48
A. Pengelompokan Kendaraan Bermotor di Indonesia	48
B. Pengaturan Hukum Mengenai Kendaraan Bermotor di Indonesia	50
1. Ketentuan Yang Berkaitan Dengan Kendaraan Bermotor di Indonesia	50
2. Ketentuan Yang Berkaitan Dengan Standardisasi Emisi atau Gas Buang Kendaraan Bermotor di Indonesia	53
C. Standardisasi emisi atau gas buang kendaraan bermotor dan kaitanya dengan kesehatan	55
BAB IV TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENGATUR DAN MENINGKATKAN STANDAR GAS BUANG KENDARAAN	61
A. Tanggungjawab negara dalam melindungi kehidupan dan kesehatan makhluk hidup dikaitkan dengan standar gas buang kendaraan bermotor.	61
1. Tanggung jawab negara terhadap masyarakat internasional	62

2. Tanggung jawab negara terhadap warga negara dan lingkungannya	70
B. Urgensi peningkatan standar gas buang kendaraan bermotor dikaitkan dengan pengadopsian Euro 5 dan Euro 6 di Indonesia.....	86
BAB V PENUTUP.....	98
A. SIMPULAN	98
B. SARAN	102
1. Untuk Pemerintah.....	102
2. Untuk Masyarakat	103
3. Untuk Akademisi Penelitian.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105

